



EXECUTIVE SUMMARY

Kajian Disparitas Perempuan dan Pembangunan

**Kota Surakarta
Tahun 2023**



PENDAHULUAN

Perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki di masyarakat, ternyata mengakibatkan perbedaan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan di Kota Surakarta. Peran serta perempuan masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan peran serta laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender), IDG (Indeks Pemberdayaan Gender), TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), fenomena feminisasi kemiskinan, dan tingkat keterwakilan perempuan di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di Surakarta. Dampaknya, perempuan tidak memperoleh manfaat yang sama dengan laki-laki dari proses maupun hasil pembangunan di Kota Surakarta. Akibatnya, pembangunan belum dapat berlangsung secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sering menimbulkan kesenjangan terutama bagi kaum perempuan yang ditunjukkan dengan rendahnya kualitas hidup perempuan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan peran serta perempuan namun kesetaraan gender yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan tujuan kelima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender menjadi target pembangunan dari banyak negara terutama yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi. Dalam pembangunan manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki di berbagai aspek kehidupan terus didorong secara maksimal. Oleh karena itu, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di berbagai bidang pembangunan.



Dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender digunakan beberapa indikator diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Sementara, IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi.

Menyadari akan pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berupaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan mendorong pemberdayaan gender di berbagai bidang pembangunan dengan mengadakan kegiatan Kajian Disparitas Perempuan dan Pembangunan Kota Surakarta yang bertujuan untuk menganalisis urgensi kesetaraan gender, disparitas gender dalam politik, ekonomi, dan sosial, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan indeks pemberdayaan gender dalam pembangunan di Kota Surakarta.

METODOLOGI

Sumber data yang digunakan dalam Kegiatan Kajian Disparitas Perempuan dan Pembangunan Kota Surakarta adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dengan cara wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah perangkat daerah terkait.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari studi literatur dan data-data pendukung mengacu kepada data dasar untuk menunjang kedalaman materi rencana yang akan disusun, yaitu:

1. RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026;
2. Data pembangunan terpilah gender di Kota Surakarta;
 - a. Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kota Surakarta.

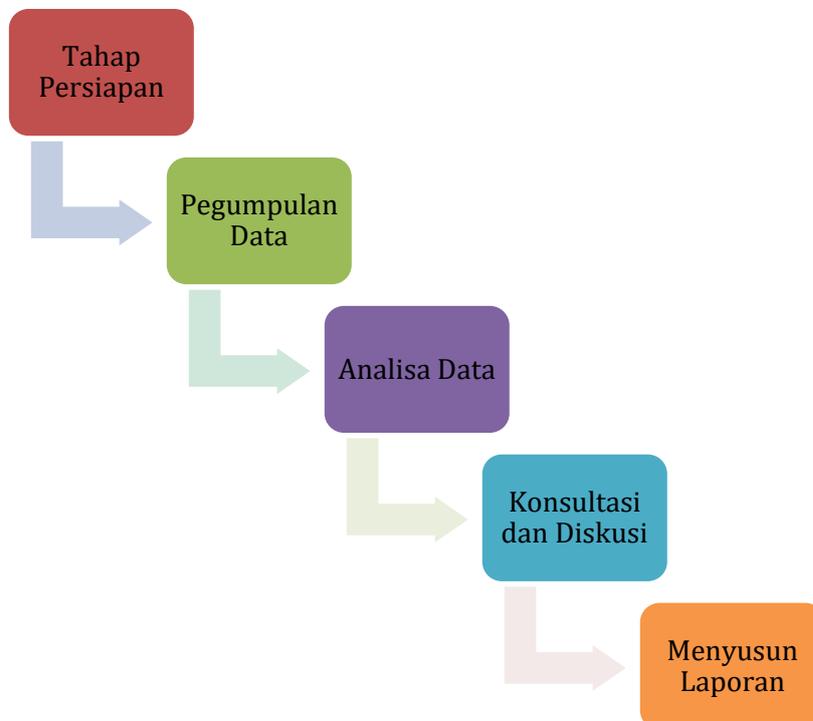


- b. Perangkat Daerah antara lain Bappeda, DP3AP2KB, Bakesbangpol, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial.
 - c. Pengadilan Agama Kota Surakarta.
3. Studi terdahulu;
 4. Referensi Hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam Kajian Disparitas Perempuan dan Pembangunan Kota Surakarta ini menggunakan pendekatan *mix-method* atau campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode statistika deskriptif, sedangkan dalam pendekatan kualitatif data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut.





HASIL PENELITIAN

1. Urgensi Kesetaraan Gender Dengan Pembangunan

A. Kaitan Antara Kesetaraan Gender dan Pembangunan

a) Pembangunan dari Perspektif Kesetaraan Gender

Di dalam tujuan ke-5, SDGs menetapkan sejumlah target capaian yang menjadi indikator keberhasilan dari tujuan kesetaraan gender, yaitu (UNDP, Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene, 2020):

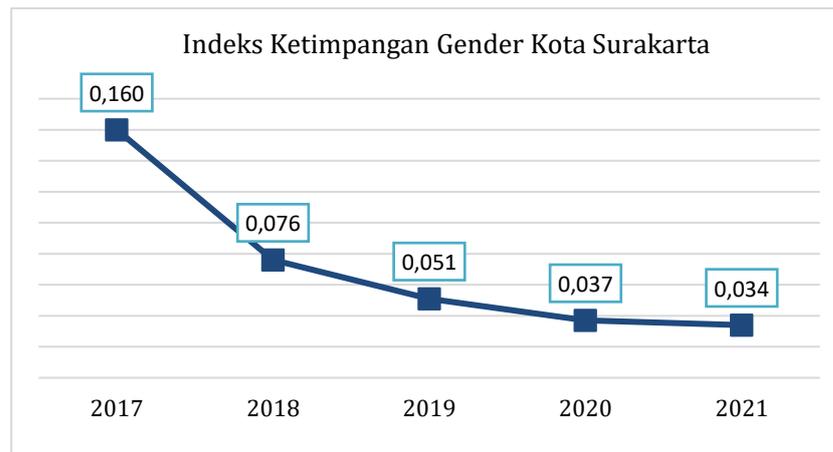
1. Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun.
2. Menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual dan berbagai jenis eksploitasi lainnya.
3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti anak, pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin wanita.
4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.
6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan Platform Aksi Beijing serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
7. Melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk properti lainnya, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan.



9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang kuat dan perundang-undangan yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.

b) Ketimpangan Gender Berbanding Lurus dengan Kegagalan Pembangunan Ekonomi

Ketimpangan gender masih menjadi salah satu permasalahan krusial dalam proses pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Ketimpangan gender merupakan sistem dan struktur sosial dimana laki - laki maupun perempuan bisa menjadi korban yang tidak adil dari sistem yang terbentuk akibat konsep pemikiran masyarakat terhadap adanya gender. Sebagai ukuran ketimpangan gender, *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 2010 memperkenalkan *Gender Inequality Index* (GII). Seiring dengan pengembangan pengukuran ketimpangan gender yang dilakukan UNDP, BPS melakukan penghitungan GII dengan menghitung Indeks Ketimpangan Gender (IKG).



Gambar 1 Indeks Ketimpangan Gender Kota Surakarta

Sumber: BPS, 2023

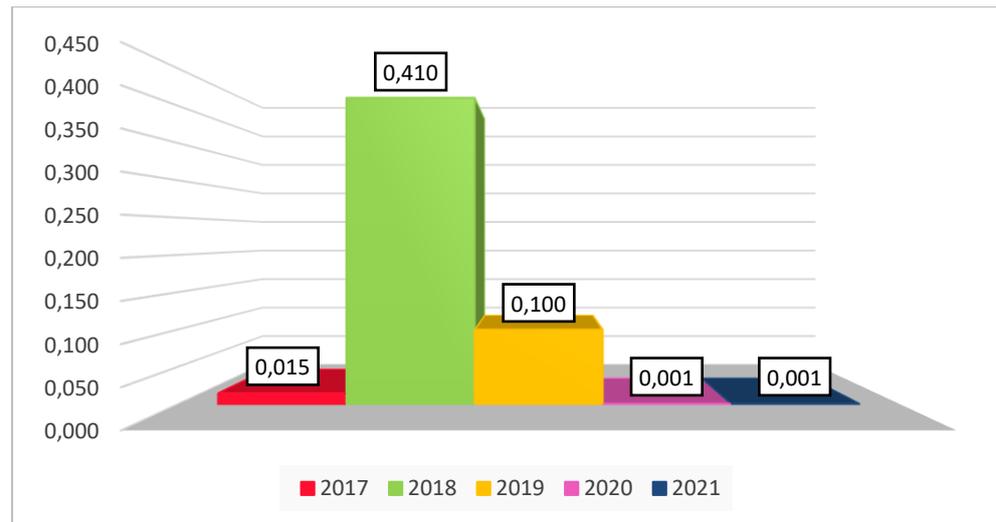
Indeks Ketimpangan Gender Kota Surakarta selama enam tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 IKG di Kota Surakarta sebesar 0,034, hal ini mencerminkan bahwa kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender adalah sebesar 3,4 persen. Indikator penyusun IKG Kota Surakarta dipengaruhi oleh komponen sebagai berikut.

a) Indikator Faktor Risiko Kematian Ibu

Pertumbuhan indikator faktor risiko kematian ibu diukur melalui proporsi persalinan tidak di fasilitasi kesehatan. Kesehatan ibu dan bayi



menjadi tolok ukur penting dalam menandai keberhasilan disparitas aspek kesehatan tiap daerah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat pendidikan dan informasi yang tidak merata, khususnya bagi perempuan. Selain itu, juga karena akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai belum merata antar daerah. Meningkatkan akses layanan kesehatan, kualitas, dan keadilan dalam kesehatan ibu dan bayi, menjadi salah satu kunci mengurangi faktor resiko kematian ibu.



Gambar 2 Indeks Ketimpangan Gender Kota Surakarta

Sumber: BPS, 2023

b) Indikator Fertilitas Remaja

Kehamilan dan melahirkan pada usia remaja memiliki konsekuensi yang sangat penting pada tingkatan global, sosial, maupun individu. Secara global, pertumbuhan penduduk akan lebih cepat ketika seorang wanita memiliki anak pertama mereka pada usia remaja serta akan memperpanjang masa reproduksi yang berkonsekuensi pada peningkatan fertilitas. Pada tingkatan sosial masyarakat, adanya hubungan yang kuat antara melahirkan pada usia remaja dengan rendahnya tingkat pendidikan membawa dampak negatif pada posisi sosial mereka di masyarakat. Secara individual, fertilitas remaja dikaitkan dengan permasalahan kesehatan ibu dan anak yang merugikan termasuk sulitnya persalinan, berat badan lahir rendah, keterlambatan pertumbuhan janin dan angka kematian ibu.



Gambar 3 Indeks Ketimpangan Gender Kota Surakarta

Sumber: BPS, 2023

c) Indikator Pendidikan



Gambar 4 Indeks Ketimpangan Gender Kota Surakarta

Sumber: BPS, 2023

Menurut, Meutia Hatta (Swasono, n.d.) bahwa kuatnya budaya patriarki menyebabkan pemikiran bahwa adalah kesia-siaan menyekolahkan anak perempuan ke jenjang yang lebih tinggi. Beliau menuturkan bahwa setinggi-tingginya perempuan bersekolah, akhirnya masuk dapur juga. Pemikiran seperti ini tentu merupakan pemikiran yang sangat picik di era yang sudah semakin berkembang di masa ini. Paham inilah yang akan menjadikan bangsa kita jalan di tempat atau yang lebih buruk adalah semakin terpuruk ke dalam ketertinggalan.



d) Indikator Parlemen



Gambar 5 Indeks Ketimpangan Gender Kota Surakarta

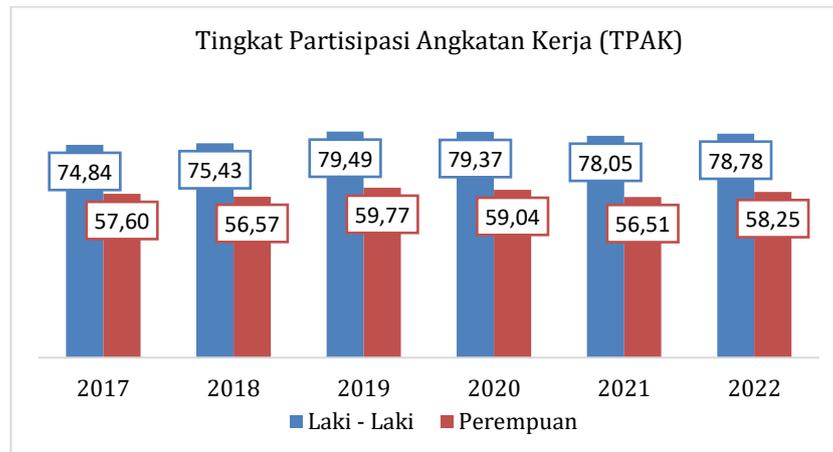
Sumber: BPS, 2023

Kesetaraan perempuan di berbagai aktivitas politik dan kebijakan publik memang belum menunjukkan kesetaraan yang maksimal, masih adanya diskriminatif yang didasarkan kepada budaya patriarki. Budaya ini masih sangat kuat dipegang oleh masyarakat di negara berkembang. Namun jika diperhatikan dengan adanya keikutsertaan perempuan sebagai pembuat kebijakan dalam parlemen maka akan memberi kontribusi sangat besar pada ketimpangan gender dalam aspek politik.

Pentingnya meningkatkan representasi perempuan karena pengalaman dan kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan memiliki pengalaman dan kepentingan berbeda, bahkan bertentangan, dengan laki-laki yang tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan. Oleh karena jumlah perempuan di parlemen yang masih sangat terbatas, maka kemampuan untuk menyuarakan kepentingan perempuan pun menjadi terbatas. Artinya, jenis kelamin perempuan yang dinyatakan dengan kebijakan kuota menjadi penentu bagi terpenuhinya representasi perempuan. Partisipasi politik perempuan yang rendah dan berbagai kebijakan sehingga tampak kurang berdampak pada pencapaian hak-hak perempuan.



e) Indikator Pasar Kerja



Gambar 6 Indeks Ketimpangan Gender Kota Surakarta

Sumber: BPS, 2023

Salah satu penyebab masih rendahnya persentase angkatan kerja atau TPAK perempuan di Indonesia adalah faktor budaya dan norma yang masih berlaku di sebagian besar masyarakat yaitu peran tradisi lebih penting dari peran transisinya sehingga perempuan memiliki kecenderungan untuk tetap di rumah dan merasa bertanggung jawab untuk mengurus keluarga di rumah, sehingga menolak untuk memasuki pasar kerja. Perempuan bisa memiliki dua peran yaitu peran tradisi sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga juga bisa memiliki peran transisi yaitu sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan partisipan pembangunan (Dwi, 2017). Di sebagian wilayah Indonesia masih berlaku norma di mana penghargaan masyarakat terhadap perempuan yang mengurus anak dan suami di rumah lebih tinggi dibandingkan penghargaan yang diberikan terhadap perempuan yang memiliki karier di luar rumah (Azmi, Ismail, & Basir, 2012). Faktor lain yang tidak kalah penting pengaruhnya adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan Indonesia untuk dapat memasuki pasar kerja serta masih banyak terjadi pernikahan dini (Scholastica, 2018).

B. Arah Kebijakan Kota Surakarta

Secara eksplisit pembangunan gender masuk dalam misi ke-4 (empat) Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Misi ini bertujuan untuk menghadirkan kondisi meningkatnya pembangunan sumber



daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju. Kondisi tersebut akan dicapai dengan 8 strategi sebagai berikut.

- a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk Peningkatan akses dan Kualitas pendidikan formal, non formal dan informal mewujudkan Surakarta Kota Cerdas (smart City).
- b. Penguatan Literasi masyarakat mendukung eksistensi Surakarta Kota Budaya.
- c. Perluasan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja.
- d. Peningkatan prestasi dan produktivitas pemuda.
- e. Penguatan keberdayaan kelurahan berdaya saing dalam mengoptimalkan sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- f. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- g. Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif, dan berbudaya unggul.
- h. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Penguatan kolaborasi lintas pelaku seni budaya dan industri seni mewujudkan *Smart Culture* di Kota Surakarta.

Pembangunan gender didukung oleh strategi ke-6 yaitu peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dengan arah kebijakan teknis sebagai berikut.

- (i) Optimalisasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, dan manajemen SDM organisasi perangkat daerah;
- (ii) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- (iii) Peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi.

Adapun program unggulan Walikota Surakarta sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan kota di Kota Surakarta yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta meningkatkan kesetaraan gender dalam birokrasi dan BUMD melalui perbaikan manajemen talenta.



C. Gambaran Permasalahan Gender di Kota Surakarta

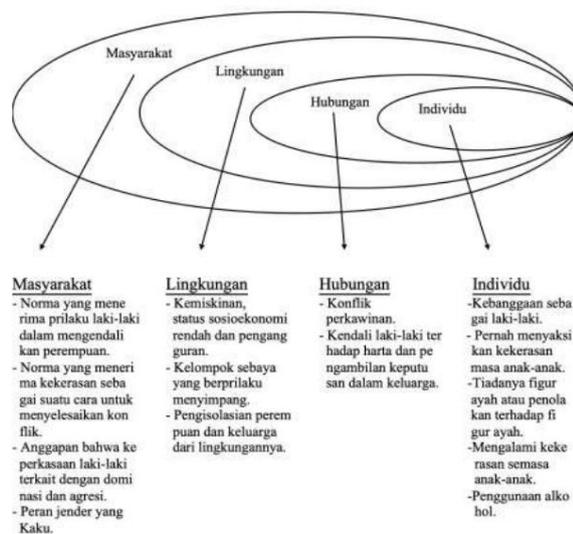
a) Angka Kekerasan terhadap Perempuan

Tabel 1 Angka Kekerasan Terhadap Perempuan

Tahun	Kekerasan Seksual		Penganiayaan		Bullying		Total
	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	
2017	0	18	0	3	-	-	21
2018	1	13	1	1	0	2	18
2019	0	11	1	3	0	4	19
2020	1	5	0	2	0	10	18
2021	1	16	1	7	1	3	29
2022	6	19	0	3	0	8	36

Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Surakarta

Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap kaum perempuan seperti dari masyarakat, lingkungan, hubungan, dan individu dimana masing-masing faktor tersebut memiliki beragam sumber masalah yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung pada terjadinya tindakan kekerasan pada perempuan.



Sumber: Muhammad Jadi, Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Pemicu dan Alternatif Penanganan.

b) Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tabel 2 Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tahun	Perempuan	Anak	Total
2017	34	12	46
2018	17	20	37
2019	17	15	32
2020	16	14	30
2021	19	23	42
2022	26	18	44

Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Surakarta

Jika ditelaah berdasarkan dokumen GAP-GBS dari UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta, diketahui bahwa faktor



kesenjangan/permasalahan yang menyebabkan banyaknya kasus KDRT di Kota Surakarta adalah berkaitan dengan akses yakni masih banyaknya korban kekerasan yang enggan melaporkan ke pihak terkait karena merasa malu, takut dan dianggap sebagai aib keluarga. Sebab kesenjangan internal adalah belum optimalnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan karena keterbatasan sumber daya manusia, sedangkan sebab kesenjangan eksternal adalah belum optimalnya koordinasi penanganan kasus terkait lembaga penyedia layanan, belum optimalnya lembaga layanan berbasis masyarakat (PPT), terkendalanya akses rujukan, serta belum optimalnya kapasitas kelembagaan mitra kerja dalam memberikan layanan terhadap perempuan korban kekerasan perempuan.

c) Angka Pernikahan Anak

Tabel 3 Angka Pernikahan Anak

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Banjarsari	6	18	24
Jebres	5	25	30
Laweyan	4	9	13
Pasar Kliwon	7	16	23
Serengan	3	5	8
(Luar Kota)	2	1	3
Total	27	74	101

Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Surakarta

Tabel 4 Dispensasi Perkawinan

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki - Laki	Perempuan	
2017			40
2018			43
2019	14	56	70
2020	58	85	143
2021	64	77	141
2022			110

Sumber: Pengadilan Agama Kota Surakarta

Merujuk pada jurnal berjudul Menelusik Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kota Surakarta (Giyartika, Nurhadi, & Yuhastina, 2021), diketahui bahwa pernikahan anak mayoritas terjadi karena kehamilan di luar nikah dan dorongan dari kedua orang tua. Seringkali pengaruh buruk pergaulan dan media sosial serta kurangnya pengawasan dari orang tua melatarbelakangi terjadinya kehamilan di luar nikah pada usia anak. Selain itu, mayoritas orang tua memiliki anggapan bahwa dengan menikahkan anaknya ketika ada yang mau dan dianggap mampu, orang tua akan menikahkannya. Orang tua



memiliki keyakinan bahwa dengan jalan pernikahan dapat mengurangi beban keluarga.

Selain itu kasus pernikahan usia anak demikian juga terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua yang menikah pada usia anak terhadap pola asuh anak, sehingga terjadi kasus praktik pernikahan anak lintas generasi (Herawati, Sekaring, & Trijayanti, 2017). Faktor pendidikan rendah serta pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi juga merupakan faktor yang mendorong terjadinya praktik pernikahan usia anak di Kota Surakarta (Erwianysah, Demartoto, & Supriyadi, 2018). Praktik pernikahan anak demikian, tentunya membawa beberapa dampak yang mengkhawatirkan terutama pada risiko kekerasan dan pelecehan (Svanemyr, 2012).

Seringkali tekanan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketahanan keluarga (Herawati, Sekaring, & Trijayanti, 2017). Kurangnya komunikasi, kesalahpahaman dan perdebatan ekonomi menjadi pemicu terjadinya kasus KDRT yang rentan terhadap ketahanan keluarga atau terjadinya kasus perceraian, yang dapat berdampak buruk baik bagi suami, istri maupun anak.

d) Angka Trafficking

Perdagangan orang (*Trafficking*) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Tabel 5 Angka Trafficking

Tahun	Perempuan	Anak	Total
2017	0	1	1
2018	0	1	1
2019	0	1	1
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	1	1

Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Surakarta



e) Angka Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.

Tabel 6 Angka Kemiskinan

Kecamatan	2019		2020		2021		2022	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Kecamatan Laweyan								
Warga Miskin	4.041	4.071	2.854	3.029	3.242	3.447	3.631	3.773
Rentan Resiko Sosial	7.231	7.338	7.381	7.394	9.921	10.028	10.640	10.860
Kecamatan Serengan								
Warga Miskin	2.701	2.647	2.190	2.097	2.139	2.076	2.051	1.959
Rentan Resiko Sosial	5.579	5.568	6.180	6.130	6.941	6.962	7.865	7.980
Kecamatan Pasarkliwon								
Warga Miskin	3.437	3.471	2.867	2.826	3.367	3.364	3.415	3.357
Rentan Resiko Sosial	12.759	12.551	13.717	13.645	15.555	15.392	17.527	17.422
Kecamatan Jebres								
Warga Miskin	6.467	6.272	4.154	4.165	4.713	4.738	5.385	5.378
Rentan Resiko Sosial	15.303	15.470	15.706	15.775	17.853	17.867	20.664	20.748
Kecamatan Banjarsari								
Warga Miskin	8.014	8.029	7.267	7.614	7.583	7.977	7.713	7.958
Rentan Resiko Sosial	19.506	19.537	20.449	20.162	23.869	23.679	26.131	26.240
Kota Surakarta								
Warga Miskin	24.660	24.490	19.332	19.731	21.044	21.602	22.195	22.425
Rentan Resiko Sosial	60.378	60.464	63.433	63.106	74.139	73.928	82.827	83.250

Sumber: Dinas Sosial Kota Surakarta, 2023

f) Angka Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

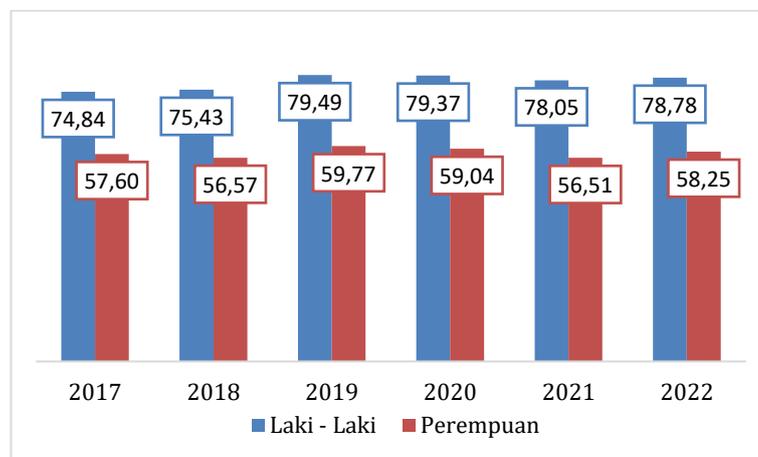


Tabel 7 Angka Disabilitas

Tahun	Fisik		Netra/ Buta		Rungu/ Wicara		Mental/ Jiwa		Fisika dan Mental		Lainnya		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2017	167	108	57	46	99	95	140	76	29	20	112	69	1.018
2018	180	130	58	51	108	99	142	82	31	21	196	167	1.265
2019	170	103	54	44	98	94	137	82	29	21	117	80	1.029
2020	155	98	51	39	93	91	131	83	30	22	114	69	976
2021	147	96	47	38	92	90	128	81	43	35	114	73	984
2022	190	135	62	50	166	146	676	366	44	35	44	35	1.949

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

g) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



Gambar 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2023

Menurut Analisa Bank Dunia, TPAK yang rendah menunjukkan dan juga disebabkan kurangnya layanan pengasuhan anak yang sangat dibutuhkan bagi perempuan usia produktif yang bekerja. Sedikitnya fasilitas penitipan anak di tempat kerja, baik di kantor pemerintah, perusahaan swasta, maupun masyarakat dapat menghambat perempuan di wilayah perkotaan dan pedesaan untuk bekerja. Bagi perempuan usia produktif, beban pengasuhan anak menimbulkan kendala untuk bekerja.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Menaker RI, Ibu Ida Fauziah, bahwa rendahnya TPAK perempuan disebabkan oleh banyaknya hambatan yang dihadapi perempuan yang bekerja, diantaranya adalah beban ganda, masih adanya *gender shaming* alias stereotip dan seksisme yang menjadi akar diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan. Adanya gender shaming (stereotyping dan seksisme) menjadi akar diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan. Perempuan kerap kali dianggap lebih lemah, kurang



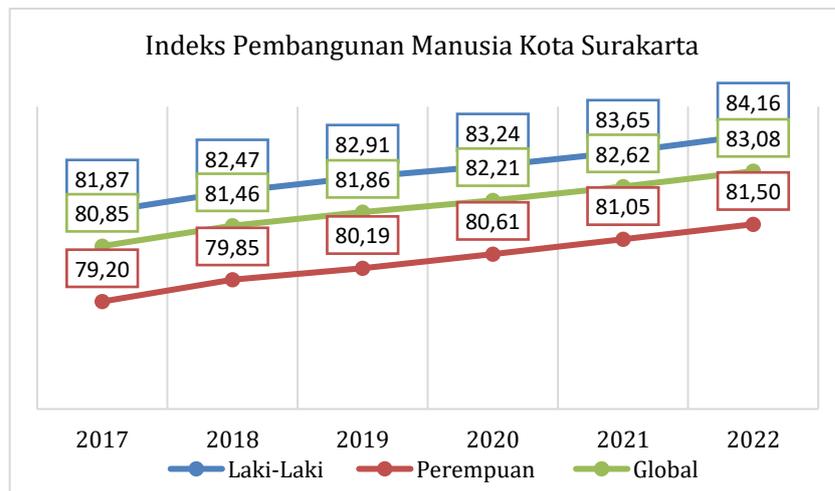
mampu, kurang pantas untuk melakukan pekerjaan tertentu atau memegang jabatan pekerjaan tertentu (Kristianus, 2022).

Selain itu rendahnya TPAK perempuan juga dipengaruhi oleh kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat bagi perempuan untuk bekerja. Adanya ajaran yang menyampaikan bahwa perempuan tidak mempunyai kewajiban untuk mencari penghasilan atau hanya sebagai pencari nafkah tambahan, tidak memotivasi perempuan untuk bekerja. Akibatnya motivasi kerja perempuan berbeda (lebih rendah) dibanding dengan laki-laki.

Motif dan tujuan dalam bekerja akan berbeda antara pria dan wanita. Bagi pria, bekerja merupakan kewajiban yang harus dijalankan karena tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Sedangkan bagi wanita, khususnya yang berstatus menikah bekerja dapat diartikan untuk membantu perekonomian keluarga. Bagi wanita yang mampu/kaya, bekerja berarti dapat berfungsi sebagai pengisi waktu atau untuk menunjukkan identitas diri (Rahaju et al., 2012).

2. Pembangunan Gender

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, pembangunan manusia Kota Surakarta terlihat terus mengalami peningkatan. Pada Gambar 5.22 menunjukkan adanya tren peningkatan capaian IPM yang sama-sama terjadi pada perempuan dan laki-laki.



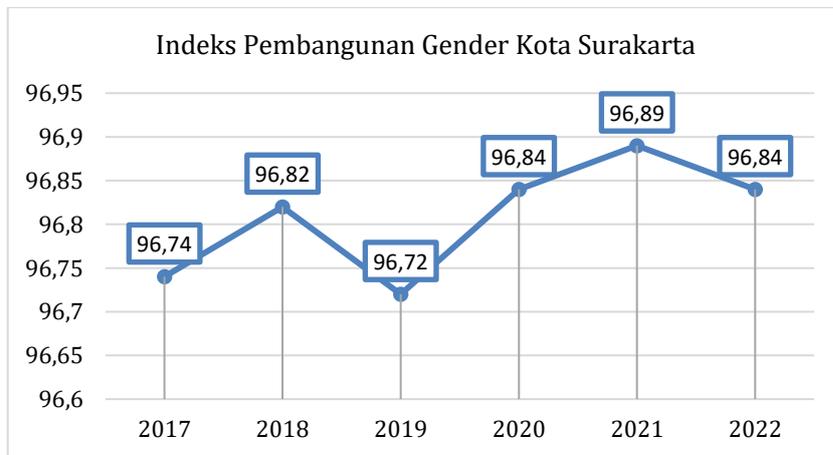
Gambar 8 IPM Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: BPS, 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang selalu digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan perempuan telah dilaksanakan. Ukuran



dalam IPG, sama dengan IPM menggunakan 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.



Gambar 9 IPG Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: BPS, 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta selama enam tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2022, IPG Kota Surakarta mengalami penurunan sebesar 0,05 persen dari tahun sebelumnya menjadi 96,84.

Perkembangan IPG dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator penyusunnya. Perkembangan indikator-indikator penyusun IPG akan dibahas sebagai berikut.

A. Pembangunan Gender Di Bidang Kesehatan

Salah satu elemen utama yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah usia panjang dan sehat (*a long and healthy life*). Indikator ini mengacu pada Angka Harapan Hidup (AHH) pada penduduk yang dihitung sejak kelahirannya.



Gambar 10 AHH Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: BPS, 2023



Lebih lamanya harapan hidup pada perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain faktor sosial yang menggambarkan perilaku hidup perempuan dinilai lebih sehat dibandingkan laki-laki, komponen lain yang turut mempengaruhi usia perempuan lebih lama dari laki-laki adalah faktor genetik atau *female advantages* (FA). Keberadaan *female advantages* ini terkait dengan kromosom X yang dimiliki perempuan, perempuan memiliki dua kromosom X (XX) sedangkan pria hanya memiliki satu kromosom X (XY). Kromosom ini turut mendukung kerja sistem imun pada tubuh. Oleh sebab itu, perempuan dianggap lebih tahan terhadap kerusakan (mutasi) kromosom karena memiliki cadangan kromosom X, sedangkan laki-laki tidak. Selain itu, risiko mengalami infeksi pada kaum perempuan lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki.

Kemudian, kadar hormon estrogen yang lebih tinggi pada perempuan daripada laki-laki. Hormon estrogen memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko terjadinya berbagai penyakit (Beltekian, 2018). Selanjutnya, konstruksi gender juga dapat menjadi salah satu aspek yang penting dilihat terkait AHH laki-laki lebih pendek dibandingkan perempuan. Faktor kebiasaan merokok yang lebih tinggi pada laki-laki, kemakluman atau penerimaan budaya pada laki-laki yang mengkonsumsi alkohol, begadang (pola tidur tidak teratur), tidak berperilaku hidup bersih dan sehat, dan kurang gerak (kurang olahraga dan banyak dilayani) dapat menjadi faktor pemicu harapan lama hidup pada laki-laki menjadi lebih rendah. Pada perempuan, konstruksi gender juga membuka peluang perempuan berperilaku lebih sehat, misalnya dengan adanya tugas pengasuhan pada perempuan yang membuka peluang perempuan mempelajari gizi keluarga dan menyadari pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah. Tuntutan budaya pada perempuan yang cantik, bersih, dan wangi mendorong perempuan lebih memperhatikan pola hidup bersih dan sehat. Sejumlah konstruksi gender yang menjadi contoh di atas menyebabkan perempuan lebih sehat dibandingkan laki-laki yang berimplikasi pada harapan hidup perempuan yang lebih lama dibandingkan laki-laki.

B. Pembangunan Gender Di Bidang Pendidikan

Pembangunan manusia tidak bisa dilepas dari proses pendidikan. Tanpa pendidikan, pembangunan manusia hampir tidak mungkin terjadi. Dalam mengukur hasil pembangunan manusia, elemen pendidikan dilihat berdasarkan



dua indikator, yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).



Gambar 11 HLS Kota Surakarta Tahun 2017-2022

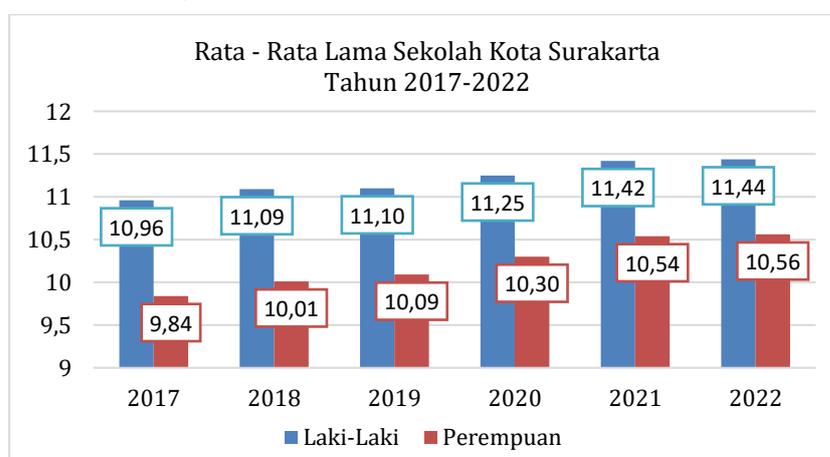
Sumber: BPS, 2023

Perbedaan harapan bersekolah pada laki-laki yang mayoritas sedikit lebih rendah dibanding perempuan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor. Di sejumlah daerah, anak laki-laki dituntut membantu orang tua bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga karena konstruksi budaya memposisikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Situasi ini dapat berkontribusi pada tingkat partisipasi sekolah laki-laki yang lebih rendah ketimbang perempuan. Data 2022 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah Kota Surakarta sebagai berikut.

Tabel 8 Angka Partisipasi Sekolah Kota Surakarta Tahun 2022

Umur	Angka Partisipasi Sekolah		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
7-12 tahun	99,11	99,28	99,19
13-15 tahun	95,31	96,69	95,99
16-18 tahun	72,44	73,78	73,09

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023



Gambar 12 RLS Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: BPS, 2023



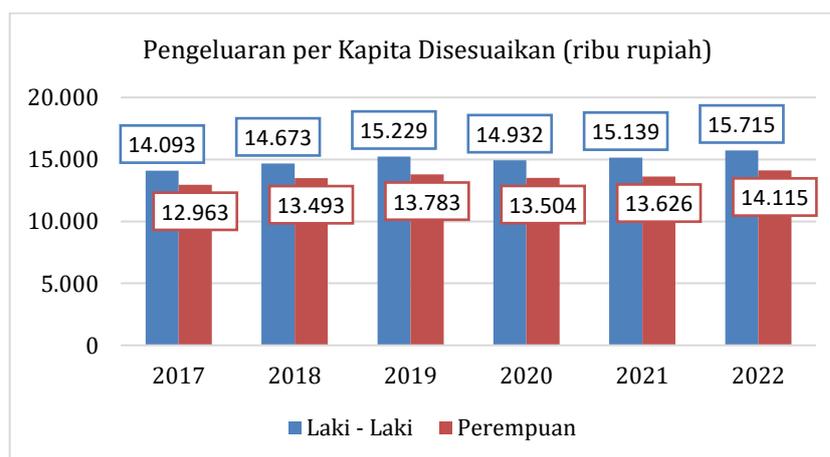
Menurut, Meutia Hatta (Swasono, n.d.) bahwa kuatnya budaya patriarki menyebabkan pemikiran bahwa adalah kesia-siaan menyekolahkan anak perempuan ke jenjang yang lebih tinggi. Beliau menuturkan bahwa setinggi-tingginya perempuan bersekolah, akhirnya masuk dapur juga. Pemikiran seperti ini tentu merupakan pemikiran yang sangat picik di era yang sudah semakin berkembang di masa ini. Paham inilah yang akan menjadikan bangsa kita jalan di tempat atau yang lebih buruk adalah semakin terpuruk ke dalam ketertinggalan.

Lebih jauh Mutia, menyatakan beberapa faktor lainnya yang mengakibatkan seorang anak perempuan memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan anak laki-laki adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya tradisi bahwa seorang anak perempuan adalah pengurus rumah tangga sehingga sebaiknya tidak dibebankan oleh pendidikan.
- 2) Walaupun ada kesempatan namun jika terbentur masalah biaya, maka anak laki-laki harus didahulukan dalam mengecap pendidikan.
- 3) Jika telah menikah dan punya anak, maka si perempuan harus menghentikan proses pendidikannya dengan alasan kepentingan keluarga.

C. Pembangunan Gender Di Bidang Ekonomi

UNDP menetapkan *Human Development Index* (HDI) di bidang ekonomi menggunakan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB/GNI) perkapita dengan menggunakan tingkat konversi paritas daya beli/ *Purchasing Power Parity* (PPP).



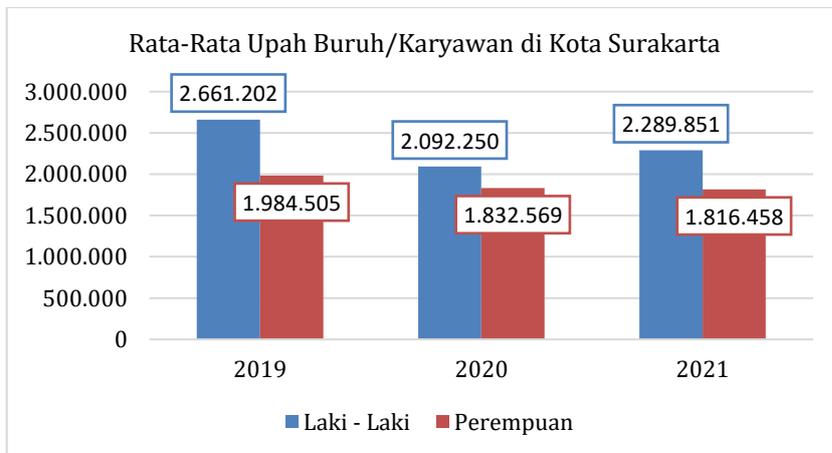
Gambar 13 Pengerluaran Perkapita Disesuaikan Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: BPS, 2023

Ada banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan pengeluaran per kapita pada perempuan, salah satu faktor utama kesenjangan ekonomi ini dapat dilihat



dari perbedaan upah yang diterima. Secara umum, rata-rata upah/gaji yang diterima perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki.



Gambar 14 Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: BPS, 2023

3. Pemberdayaan Gender

Pemberdayaan gender dalam pembangunan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.



Gambar 15 IDG Kota Surakarta Tahun 2017-2022

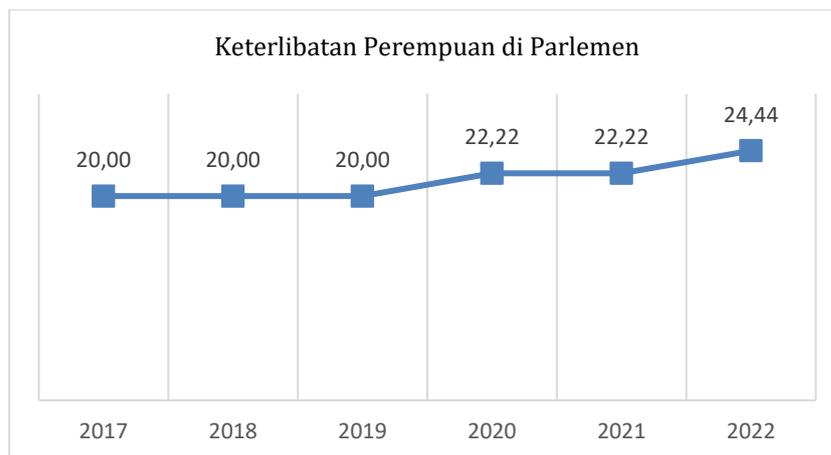
Sumber: BPS, 2023

A. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Dalam sistem partai, selain sistem multipartai, dukungan partai terhadap perempuan masih rendah karena ditopang oleh kebijakan partai yang bias gender dan pengambilan keputusan yang masih didominasi laki-laki. Situasi ini semakin dilemahkan oleh pendidikan publik yang dilakukan media untuk



mendorong representasi perempuan di parlemen masih belum maksimal. Akibatnya, pengetahuan masyarakat tentang urgensi memilih calon perempuan masih belum banyak disadari karena pemberitaan masih belum sepenuhnya menguatkan keberpihakan pada keterwakilan perempuan. Faktor lain yang dinilai menjadi penghambat adalah kemiskinan, kontrol terhadap sumber dana kampanye di dalam keluarga (Parawansa, 2002), dan relasi gender antara perempuan dengan suaminya.



Gambar 16 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: BPS, 2023

B. Perempuan Sebagai Tenaga Profesional



Gambar 17 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: BPS, 2023

Gambar 17 menunjukkan bahwa perkembangan perempuan sebagai tenaga profesional di Kota Surakarta cukup fluktuatif karena mengalami kenaikan dan penurunan selama 6 tahun terakhir. Berdasarkan capaian tahun 2022, pemberdayaan gender di bidang tenaga profesional di Kota Surakarta



menyentuh angka 57,17 persen, hal tersebut mengindikasikan pengakuan terhadap profesionalisme perempuan terus membaik.

C. Sumbangan Pendapatan Perempuan



Gambar 18 Sumbangan Pendapatan Perempuan Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan Gambar 18, pada tahun 2022, sumbangan pendapatan perempuan sebesar 43,85 persen, mengalami kenaikan 0,28 poin dari tahun sebelumnya. Dengan adanya peningkatan yang terjadi pada tahun 2022 ini memberi sinyal cukup baik terkait partisipasi dan otonomi perempuan di bidang ekonomi.

KESIMPULAN

1. Capaian

Melalui berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan, Pemerintah Kota Surakarta telah berhasil menurunkan ketimpangan gender dari 0,160 pada tahun 2017 menjadi 0,034 pada tahun 2021. Meski demikian angka ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender yaitu sebesar 3,4 persen. Keberhasilan Pemerintah Kota Surakarta untuk menurunkan angka ketimpangan gender tersebut tidak terlepas dari kemampuannya untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi perempuan sehingga berhasil menurunkan proporsi persalinan tidak difasilitasi kesehatan serta proporsi wanita berusia 15 – 49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun, meningkatkan persentase perempuan yang menempuh pendidikan minimal SLTA dari 52,60 persen pada tahun 2017 menjadi 65,90 pada tahun 2021.



2. Tantangan

a. TPAK Perempuan Rendah

Disamping capaian tersebut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota Surakarta untuk mengatasi permasalahan disparitas gender di bidang pembangunan ekonomi dan politik. Di bidang pembangunan ekonomi, dilihat dari Indikator Pasar Kerja, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) bergerak sangat lambat sebesar 0,22 persen dalam 5 tahun terakhir sejak 2017 hingga 2022, dari 57,60 pada tahun 2017 menjadi 58,25 pada tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan capaian Kota dan Kabupaten lain di Jawa Tengah, maka TPAK Perempuan Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 58,25 masih lebih rendah daripada TPAK Perempuan Provinsi Jawa Tengah sebesar 58,31. Kesetaraan gender akan berdampak positif terhadap pembangunan. Sebaliknya, ketimpangan gender akan berdampak negatif terhadap pembangunan. Logika tesis ini terlihat dalam ilustrasi berikut.



b. Keterwakilan Perempuan di DPRD

Tantangan lain yang dihadapi Kota Surakarta adalah keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta. Sampai tahun 2022 terdapat 11 perempuan dari 45 anggota DPRD Kota Surakarta, atau setara dengan 24,44 persen. Jika dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah lainnya pada tahun yang sama, angka 24,44 persen sudah cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa cita-cita perempuan untuk menargetkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen bukanlah suatu hal yang mustahil. Meningkatnya jumlah perempuan di DPRD diharapkan akan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perempuan.



c. Pernikahan Anak Masih Tinggi

Pernikahan anak di Kota Surakarta masih tinggi ini terlihat dari jumlah pernikahan anak pada tahun 2022 sebanyak 101 anak dan pengajuan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama sebanyak 110 anak.

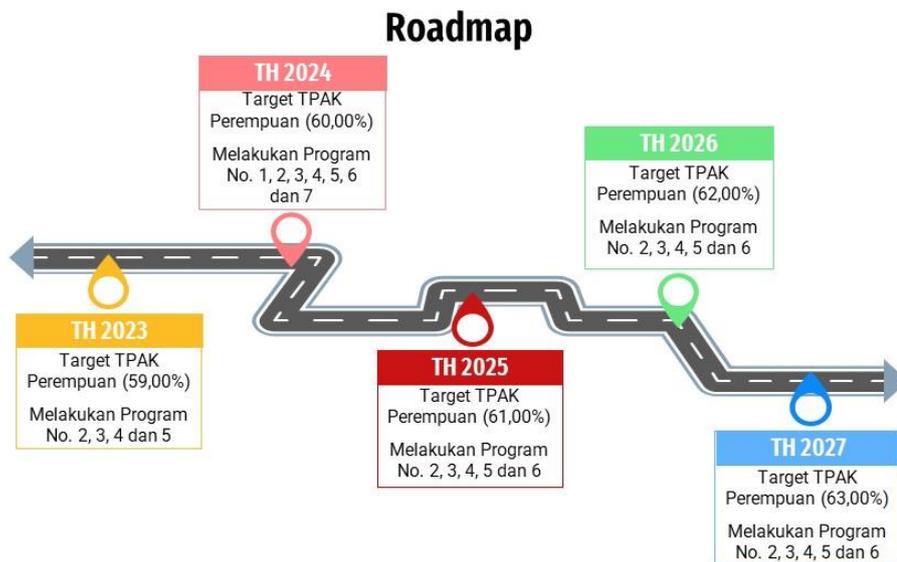
d. Rata-Rata Lama Sekolah

Pada periode waktu 2017-2022 menunjukkan rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2022, terdapat kesenjangan RLS dalam durasi hampir satu tahun antara laki-laki dan perempuan. Secara rata-rata laki-laki sudah menikmati pendidikan selama 11,44 tahun atau hingga kelas XI atau setingkat kelas 2 pada sekolah menengah atas, sedangkan perempuan menikmati pendidikan lebih cepat satu tahun yaitu selama 10,56 tahun atau kelas X atau setingkat kelas 1 pada sekolah menengah atas.

REKOMENDASI

Rekomendasi berdasarkan hasil yang telah didapatkan adalah sebagai berikut.

a. TPAK Perempuan Rendah



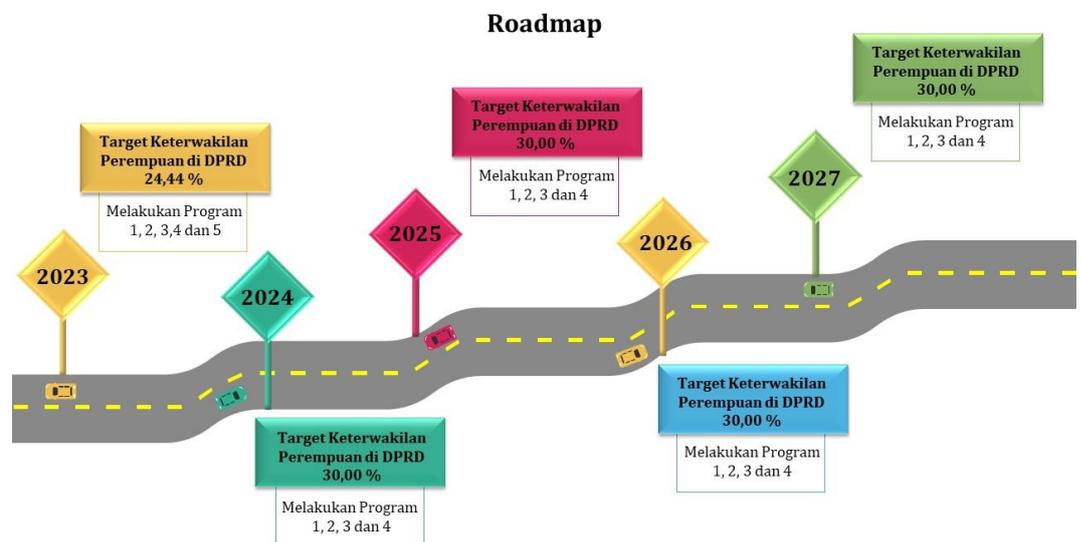
Program :

1. Penelitian yang lebih mendalam tentang strategi meningkatkan TPAK Perempuan: Belajar dari praktek baik beberapa kota dan kabupaten yang dapat mencapai TPAK Perempuan lebih dari 65 persen, yaitu Kabupaten Temanggung sebesar 65,26 persen; Kabupaten Boyolali sebesar 66,34



- persen; Kabupaten Semarang sebesar 66,87 persen; bahkan Kabupaten Magelang dapat mencapai 72,78 persen.
2. Sosialisasi dan diseminasi terhadap masyarakat akan pentingnya dukungan keluarga (suami) agar perempuan dapat bekerja demi keberhasilan pembangunan ekonomi bangsa, sosialisasi hak-hak pekerja perempuan sesuai perundang-undangan.
 3. Sosialisasi dan diseminasi untuk meningkatkan motivasi kerja perempuan, menghilangkan *stereotyping*.
 4. Pemberdayaan perempuan (pelatihan kerja bagi perempuan): pelatihan ekspor, pelatihan digital marketing (*online shop*).
 5. Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK melalui usaha rumah tangga: pelatihan, pendampingan, hingga pemberian modal usaha.
 6. Penyediaan tempat penitipan/pengasuhan anak di tempat kerja perempuan.
 7. Penyediaan aturan yang menjamin keamanan kerja bagi perempuan (masih ada pelecehan seksual).

b. Keterwakilan Perempuan di DPRD



Program :

1. Mendorong penerapan *affirmative action* dengan kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada ranah politik, baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penetapan bakal calon legislatif serta mendorong penerapan *zipper system*.



2. Membangun networking antara masyarakat (gerakan perempuan), akademisi, anggota DPRD perempuan, anggota DPRD laki-laki untuk membahas isu ketimpangan gender dalam rangka menghasilkan kebijakan yang responsif gender dan berkeadilan.
3. Membangun networking antara masyarakat (gerakan perempuan), akademisi, dan partai – partai politik untuk meningkatkan jumlah kuantitas dan kualitas Perempuan dalam Partai Politik.
4. Meningkatkan dan memperkuat praktik representasi politik perempuan.
 - Pelatihan pendidikan kebangsaan berperspektif gender baik untuk ormas/LSM, politisi, pemilih perempuan, pemilih pemula, pemilih disabilitas, pemilih marginal, media, komunitas adat dan kelompok agama.
 - Pemberdayaan perempuan dalam politik (Kampanye, *Public Speaking*, dll).
 - Peningkatan akses, partisipasi, kemampuan melakukan kontrol dan perolehan manfaat bagi perempuan dalam pembangunan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
5. Membuat Inovasi Kebijakan.
 - *Grand Design* peningkatan keterwakilan politik perempuan di legislatif.

c. Pernikahan Anak Masih Tinggi

Roadmap





Program :

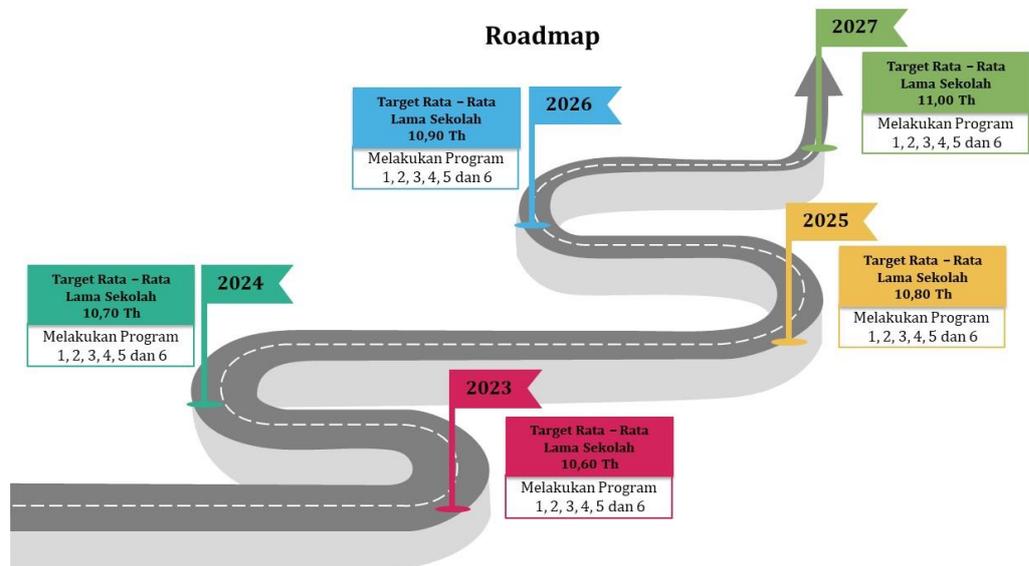
1. Memberdayakan anak perempuan dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung
 - Meningkatkan pengetahuan anak perempuan akan hak perempuan, bahaya ketimpangan gender dalam pergaulan, pendidikan kesetaraan gender.
 - Literasi digital dalam *culture, ethics, skills*, dan *safety* untuk mencegah Kekerasan Seksual Berbasis Online.
 - Pendidikan beladiri bagi anak perempuan.
 - Pendidikan akan bahaya perkawinan anak.
 - Mengembangkan layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas yang inklusif
2. Mendidik dan memobilisasi orang tua dan anggota masyarakat melalui sosialisasi dan diseminasi.
 - Sosialisasi Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja dan orang tua tentang kesehatan reproduksi.
 - Mengembangkan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sekolah formal untuk anak perempuan.
 - Meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) Perempuan.
4. Mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial.
5. Membuat Inovasi Kebijakan.
 - Membangun Gerakan Stop Perkawinan Anak / Perkawinan Anak = Kekerasan terhadap Anak / Gerakan Jo Kawin Bocah : membangun pemahaman berbagai elemen masyarakat (pemuka agama, orang



tua, anak, ormas akan bahaya pernikahan anak bagi kesehatan ibu, anak, dan persoalan ekonomi.

- Memberikan penghargaan bagi Kecamatan maupun Kelurahan yang mampu menekan angka pernikahan dini nol (0) selama minimal dua (2) tahun berturut-turut. Momen ini sebagai media monitoring evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga untuk memotivasi kecamatan dalam mengupayakan keberhasilannya.
6. Seiring dengan revisi UU Perkawinan, maka berbagai Peraturan Daerah (Perda) terkait pencegahan perkawinan usia anak yang disusun sebelum revisi perlu ditinjau ulang dan diperbaiki.

d. Rata-Rata Lama Sekolah



Program :

1. Sosialisasi dan diseminasi pencegahan perkawinan anak serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja dan orang tua tentang kesehatan reproduksi.
2. Pemberian insentif beasiswa sekolah bagi anak perempuan kurang mampu dan atau anak perempuan berprestasi.
3. Pembangunan karakter yang kuat dikalangan pelajar perempuan untuk membangun cita-cita yang tinggi, kesadaran akan pentingnya peran serta perempuan dalam pembangunan.



4. Membangun pemahaman di berbagai kalangan masyarakat, akan pentingnya pendidikan tinggi bagi semua anak, termasuk anak perempuan.
5. Memperluas lapangan kerja/meningkatkan kemampuan ekonomi perempuan (ketika perempuan mampu secara ekonomi, cenderung dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak perempuan).
6. Mengatasi kemiskinan dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial.



Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kota Surakarta